

Nama : Zildjian Fitri

NPM : 2213031086

Mata Kuliah : Ekonomi Industri

Dosen : Dr. Pujiati, M.Pd. Drs. Nurdin, M.Si., dan Meyta Pritandari, S.Pd., M.Pd.

CASE VCLASS 12

Pertanyaan:

1. Analisis Konteks:

- a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?
- b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?

Jawab:

a. Kelebihan:

Indonesia memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga mampu menjadi pemasok utama berbagai komoditas strategis dalam rantai pasok global seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik, batu bara untuk energi, serta kelapa sawit untuk industri makanan dan kosmetik. Posisi ini membuat Indonesia memiliki daya tawar karena negara lain bergantung pada bahan baku yang dihasilkan. Selain itu, peran sebagai pemasok bahan mentah membuat Indonesia dapat menarik investasi asing di sektor pertambangan dan perkebunan yang membantu mendukung penerimaan negara dan membuka lapangan kerja.

Kekurangan:

Meskipun pasokan bahan mentah menjadi keunggulan, posisi Indonesia tetap berada di bagian bawah rantai nilai global sehingga keuntungan yang diperoleh relatif kecil dibanding negara yang mengolah bahan tersebut menjadi produk bernilai tinggi. Ketergantungan pada ekspor komoditas juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Selain itu, lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya nilai tambah industri lokal, serta minimnya diversifikasi produk membuat Indonesia tidak mampu mengendalikan proses produksi global. Akibatnya, Indonesia lebih sering hanya menjadi tempat ekstraksi, bukan pusat inovasi atau manufaktur.

- b. Karena Indonesia belum berhasil memperoleh nilai tambah tinggi dalam GVC karena beberapa hambatan struktural dan kelemahan industri. Pertama, kapasitas teknologi dan kemampuan manufaktur di dalam negeri masih terbatas sehingga Indonesia sulit mengembangkan industri pengolahan yang kompleks, seperti baterai litium, komponen elektronik, atau produk turunan kelapa sawit bernilai tinggi. Kedua, kualitas sumber daya manusia belum merata, sehingga industri sulit beralih ke proses produksi yang lebih canggih. Ketiga, aturan yang sering berubah, birokrasi yang panjang, dan infrastruktur yang belum optimal di beberapa wilayah membuat biaya produksi di Indonesia lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam atau Malaysia. Selain itu, pola ekspor Indonesia masih didominasi oleh perusahaan multinasional yang memiliki kendali teknologi, sehingga transfer pengetahuan kepada pelaku industri lokal tidak berjalan maksimal. Akhirnya, kurangnya fokus jangka panjang pada pembangunan industri hilir membuat Indonesia sulit naik kelas dalam rantai nilai global dan tetap bergantung pada ekspor bahan mentah.

2. Evaluasi Kebijakan:

- a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.
- b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?

Jawab:

- a. Ya, kebijakan hilirisasi berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan industri dan kemampuan menarik investasi. Dari sisi ekonomi, larangan ekspor bijih nikel mendorong pembangunan smelter dan industri pengolahan dalam negeri sehingga nilai tambah yang sebelumnya dinikmati negara lain kini mulai dinikmati Indonesia. Dengan mengolah bijih nikel menjadi produk setengah jadi seperti NPI atau matte, Indonesia dapat naik satu level dalam rantai nilai dan tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Namun, manfaat ini baru optimal jika Indonesia dapat mengembangkan industri manufaktur lanjutan seperti bahan baku baterai atau komponen kendaraan listrik. Dari sisi geopolitik, kebijakan ini menunjukkan upaya

Indonesia memperkuat kedaulatan ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada negara pengimpor bahan mentah. Tetapi langkah ini juga membuat Indonesia semakin bergantung pada negara tertentu yang bersedia berinvestasi dalam pembangunan smelter, seperti China, sehingga keseimbangan geopolitik dapat bergeser. Artinya, hilirisasi memang dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC, tetapi keberhasilannya memerlukan strategi jangka panjang, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas nasional.

- b. Kebijakan hilirisasi berdampak signifikan terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang, khususnya negara yang selama ini menjadi importir bahan mentah Indonesia. Beberapa negara melihat kebijakan ini sebagai hambatan perdagangan yang merugikan industri mereka, sehingga hubungan dagang bisa menjadi lebih tegang, seperti kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO karena melarang ekspor bijih nikel. Di sisi lain, negara-negara yang tidak bergantung pada bahan mentah Indonesia atau yang justru tertarik membangun industri pengolahan di Indonesia akan melihat kebijakan ini sebagai peluang. Kebijakan hilirisasi juga mendorong pergeseran pola kerja sama, dari hubungan "ekspor-impor bahan mentah" menjadi hubungan "investasi-pengolahan", sehingga negara yang bersedia menanam modal akan memiliki hubungan lebih erat dengan Indonesia. Akibatnya, kebijakan ini dapat menciptakan friksi dengan beberapa mitra dagang tradisional, namun membuka hubungan ekonomi baru dengan negara yang mendukung industrialisasi Indonesia. Dengan kata lain, dampaknya tidak hanya ekonomis tetapi juga geopolitik karena mengubah aliansi dan ketergantungan dalam rantai pasok global.

3. Sintesis dan Solusi:

Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawab:

Untuk meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam Global Value Chains (GVC) tanpa merusak hubungan dagang internasional, pemerintah perlu menerapkan strategi yang menggabungkan hilirisasi industri dengan diplomasi ekonomi yang cermat. Hilirisasi tetap harus menjadi fondasi utama karena selama ini Indonesia terlalu lama bergantung pada ekspor bahan mentah yang

memiliki nilai tambah rendah. Namun, proses hilirisasi wajib dilakukan secara bertahap, terukur, dan prediktabel agar tidak menimbulkan gejolak perdagangan maupun ketidakpastian bagi investor. Pemerintah perlu menyusun peta jalan hilirisasi jangka panjang yang jelas sehingga dunia internasional memahami arah kebijakan Indonesia. Dengan demikian, negara mitra dagang tidak melihat kebijakan Indonesia sebagai proteksionisme ekstrem, tetapi sebagai transformasi ekonomi yang wajar dan sah. Hilirisasi juga harus didukung penguatan kapasitas industri melalui pembangunan pusat riset, peningkatan keterampilan tenaga kerja, kemitraan universitas–industri, dan transfer teknologi dari investor asing. Tanpa ini, Indonesia berisiko berhenti pada tahap smelter dan gagal masuk ke produksi barang bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik, panel surya, atau komponen elektronik.

Selain memperkuat industri dalam negeri, diplomasi ekonomi menjadi faktor kunci agar Indonesia tetap diterima sebagai mitra dagang yang stabil. Pemerintah perlu aktif menjalin kesepakatan bilateral dengan negara pengimpor bahan baku, misalnya perjanjian khusus yang menukar akses sumber daya dengan investasi teknologi atau pembangunan pabrik berteknologi tinggi di Indonesia. Pendekatan win–win seperti ini akan meredakan kekhawatiran negara lain dan mengurangi risiko sengketa di WTO. Di sisi lain, hubungan internasional yang baik harus dibangun melalui transparansi dan konsistensi kebijakan. Investor global membutuhkan kepastian hukum, waktu transisi kebijakan yang wajar, dan penjelasan akademik yang kuat untuk setiap perubahan regulasi. Ketika Indonesia dianggap sebagai negara yang dapat diandalkan dalam memasok bahan baku sekaligus konsisten dalam transformasi industrinya, maka reputasi Indonesia akan meningkat dan tekanan geopolitik dapat diminimalkan.

Indonesia juga perlu membangun ekosistem industri yang kompetitif melalui perbaikan infrastruktur logistik, ketersediaan energi yang efisien, dan penyederhanaan perizinan investasi. Penguatan BUMN dan kolaborasinya dengan sektor swasta global harus dilakukan agar hilirisasi tidak menjadi beban fiskal. Selain itu, Indonesia harus mengembangkan produk hilir baru dan memperluas pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Uni Eropa atau Tiongkok. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam rantai nilai global, memperoleh nilai tambah yang lebih besar, dan tetap menjaga hubungan dagang yang harmonis dengan negara mana pun.